

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyarti, A. (2016) *Evaluasi dan Strategi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)*. Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada.
- Agbonika, J. (2015) 'Tax Amnesty for Delinquent Taxpayers: a Cliché in Nigeria', *Global Journal of Politics and Law Research*, 3(3), pp. 105–120.
- Akbar, R., Pilcher, R. A. dan Perrin, B. (2015) 'Implementing performance measurement systems', *Qualitative Research in Accounting & Management*, 12(1), pp. 3–33. doi: 10.1108/QRAM-03-2013-0013.
- Alm, J. dan Beck, W. (1993) 'Tax Amnesties and Compliance in the Long Run: A Time Series Analysis', *National Tax Journal*, 46(1), pp. 53–60.
- Alm, J. dan Rath, D. (1998) 'Tax policy analysis: the introduction of a Russian Tax Amnesty', *GSU Andrew Young School of Policy Studies*, (October). doi: 10.2139/ssrn.471321.
- Aritonang, T. F. dan Rustam, A. R. (2016) 'Review Implementasi Tax Amnesty (Studi Literatur Implementasi Tax Amnesty di Indonesia dan di Beberapa Negara Lainnya)', (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya), pp. 1–25.
- Le Borgne, E. (2006) 'Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the U.S. States', *International Monetary Fund Working Papers*.
- Cresswell, J. W. (2014) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. SAGE Publications, Inc, California.
- DiMaggio, P. J. dan Poweel, W. W. (1983) 'The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields', *American Sociological Review*, Volume 48(Issue 2), pp. 147–160.
- Direktorat Jenderal Pajak (2016a) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak (2016b) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak (2016c) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan

Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (2016d) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 20/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (2016e) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (2016f) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 12/PJ/2016 Tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (2016g) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 14/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Dalam Hal Terjadi Gangguan Pada Jaringan Dan/Atau Keadaan Luar Biasa Pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (2016h) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 18/PJ/2016 Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (2016i) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 21/PJ/2016 Tentang Tata Cara Pencabutan Atas Surat Pernyataan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (2016j) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (2016k) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 28/PJ/2016 Tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (2016l) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 44/PJ/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Friedman, M. (2005) *Trying hard is not good enough: how to produce measureable improvements for customers and communities*. FPSI Publishing, Santa Fe.

Halim, A., Bawono, I. R. B. dan Dara, A. (2014) *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Hennink, M., Hutter, I. dan Bailey, A. (2011) *Qualitative Research Methods*. Sage Publications Ltd.

Ibrahim, P. (2015) *Studi Komparatif Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah: Pendekatan Riset Campuran*. Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016a) *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/KMK.03/2016 Tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016b) *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 658/KMK.03/2016 Tentang Penetapan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai tempat Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016c) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016d) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016e) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016f) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan p*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016g) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016h) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penemp.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016i) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan p.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Knowlton, L. W. dan Phillips, C. C. (2013) *The logic model guidebook.* California: SAGE Publication, Thousand Oaks.

Longo, P. J. (2002) 'The Performance Blueprint, An Integrated Logic Model Developed to Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management', (Paper presented at the Annual meeting of the American Evaluation Association (Arlington, VA, November 6-10, 2002)). Available at: <http://eric.ed.gov/>.

Luitel, H. S. dan Tosun, M. S. (2013) 'A reexamination of state fiscal health and amnesty enactment', *International Tax and Public Finance*, pp. 1–20. doi: 10.1007/s10797-013-9278-8.

Malherbe, J. (2011) *Tax Amnesties.* Kluwer Law International.

Quaghebeur, M. (2004) 'What Belgium's Tax Amnesty Will Mean', (January), pp. 1–3.

Republik Indonesia (2016) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak', (131), pp. 1–27.

Roberto, P. (2016) *Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.* Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada.

Soemarso, S. . (2007) *Perpajakan Pendekatan Komprehensif.* Salemba Empat: Jakarta.

Wirawan (2011) *Evaluasi: teori, model, standar, aplikasi, dan profesi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Yin, R. K. (2014) *Case study research design and methods.* SAGE Publications, London.

Yuliansyah, H., Marthatya, H. dan Suryani, A. W. (2015) *Manajemen dan Analisis Data Kualitatif: Dengan Perangkat Lunak NVIVO.* Jakarta: Salemba Empat: Jakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**Evaluasi Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak 2016 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama**

Surakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)

AHMAD JEFRI ADITYAS, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>